



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 100.3.1.2/KEP.28-DPRD/2025**

**TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN ANGGARAN 2026**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan hukum secara terencana, bertahap, terarah dan terpadu, setiap tahun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut perlu menyusun dan menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut;
- b. bahwa sehubungan telah diterimanya surat Bupati Garut 100.3.2/6198/Huk tanggal 21 Nopember 2025 perihal Penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2026, dan telah ditindaklanjuti dengan pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi yang hasilnya perlu dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2025 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025 Nomor 4);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025 Nomor 30);

- Memperhatikan:
1. Surat Bupati Garut Nomor 100.3/6198/Huk tanggal 21 Nopember 2025 Hal Penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2026;
 2. Hasil Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Garut tanggal 25 Nopember 2025;
 3. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tanggal 25 Nopember 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2026.**
- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut dan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut.

- KETIGA : Dalam Keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut atau Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah dalam hal:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang sifatnya urgensi
- KEEMPAT : Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Garut

pada tanggal 28 Nopember 2025

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT,**



ARIS MUNANDAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD GARUT
NOMOR 100.3.1.2/KEP.28-DPRD/2025
TANGGAL 28 NOVEMBER 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT									
1	Peraturan Daerah	Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang terdiri dari pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi Pedagang Kaki Lima, pemindahan serta peremajaan Pedagang Kaki Lima			Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahun 2026	
2	Peraturan Daerah	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Peraturan Daerah ini mengatur tentang perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan dan peran serta masyarakat	V	-	1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Dinas Pertanian	Tahun 2026	

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRAKARSA PEMERINTAH DAERAH									
1	Peraturan Daerah	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025		V	-	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tahun 2026	
2	Peraturan Daerah	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026		V	-	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tahun 2026	

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Peraturan Daerah	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2027		V	-	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tahun 2026	
4	Peraturan Daerah	Pembentukan Desa Senangmekar Kecamatan Banyuresmi	Peraturan Daerah ini memuat: a. nama Desa lama dan baru; b. nomor kode desa yang lama; c. jumlah penduduk; d. luas wilayah; e. cakupan wilayah kerja Desa baru; dan f. peta batas wilayah Desa baru	V	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2026	
5	Peraturan Daerah	Pembentukan Desa Sagawangi Kecamatan Caringin		V	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2026	
6	Peraturan Daerah	Pembentukan Desa Cisarua Kecamatan Caringin		V	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2026	
7	Peraturan Daerah	Pembentukan Desa Sagarawangi Kecamatan Cibalong		V	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2026	
8	Peraturan Daerah	Pembentukan Desa Wanamekar Kecamatan Cibalong		V	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2026	
9	Peraturan Daerah	Pembentukan Desa Cisalam Kecamatan Cibat		V	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2026	

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Peraturan Daerah	Pembentukan Desa Sukamanah Kecamatan Cigedug		V	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2026	
11	Peraturan Daerah	Pembentukan Desa Barukai Kecamatan Cigedug		V	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2026	
12	Peraturan Daerah	Pembentukan Desa Cikuray Kecamatan Cigedug		V	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2026	
13	Peraturan Daerah	Pembentukan Desa Cigembong Kecamatan Cikajang		V	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2026	
14	Peraturan Daerah	Pembentukan Desa Mekarmurni Kecamatan Cilawu		V	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2026	
15	Peraturan Daerah	Pembentukan Desa Cibuluh Kecamatan Cisarupan		V	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2026	
16	Peraturan Daerah	Pembentukan Desa Kurnia Kecamatan Kersamanah		V	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2026	
17	Peraturan Daerah	Pembentukan Desa Sindang Rahayu Kecamatan Leuwigoong		V	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2026	

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Peraturan Daerah	Pembentukan Desa Samarang Nanjung Kecamatan Samarang		V	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2026	
19	Peraturan Daerah	Pembentukan Desa Cirapuhan Kidul Kecamatan Selaawi		V	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2026	
20	Peraturan Daerah	Pembentukan Desa Ganeas Kecamatan Singajaya		V	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2026	
21	Peraturan Daerah	Pembentukan Desa Mekarsahaja Kecamatan Sukawening		V	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2026	
22	Peraturan Daerah	Pembentukan Desa Sagara Inten Kecamatan Sukawening		V	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2026	
23	Peraturan Daerah	Pembentukan Desa Rancamekar Kecamatan Tarogong Kaler		V	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2026	
24	Peraturan Daerah	Pembentukan Desa Sukarahayu Kecamatan Wanaraja		V	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2026	
25	Peraturan Daerah	Pembentukan Desa Sindangraja Kecamatan Wanaraja		V	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2026	

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Peraturan Daerah	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut 2026-2046	Peraturan Daerah ini mengatur tentang tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah, penetapan Kawasan strategis, arah pemanfaatan ruang wilayah, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, hak kewajiban masyarakat, kelembagaan, penyidikan, sanksi administratif dan pidana	V	-	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahun 2026	
27	Peraturan Daerah	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut	Peraturan ini menambahkan materi mengenai besarnya modal dasar dan modal disetor yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut	-	V	Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Daerah	Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah	Tahun 2026	

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Peraturan Daerah	Pemajuan Kebudayaan Daerah	Peraturan Daerah ini mengatur tentang tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemajuan Kebudayaan, peran serta masyarakat, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta pembiayaan.	V	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan 2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah 	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Tahun 2026	

KETUA DPRD KABUPATEN GARUT,



ARIS MUNANDAR